

TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM
PEMBUATAN AKTA BERBASIS DIGITAL**



Diajukan Oleh:
SEPTI PUSPITA ANGGARINI, S.H
2420216320089

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN
2026**

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BERBASIS DIGITAL

Tesis

**Untuk memperoleh gelar Magister
Dalam Program Magister Kenotariatan
Pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**

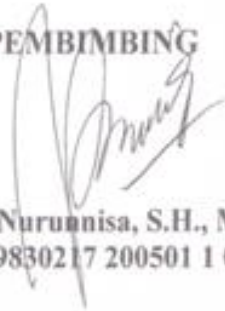
Diajukan Oleh

**Septi Puspita Anggraini, S.H
NIM 2420216320089**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN
2026**

Tesis ini
Telah diperbaiki dan disetujui
pada Tanggal 15 Juli 2026

PEMBIMBING



Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
NIP. 19830217 200501 1 009

Diketahui oleh Koordinator Program Studi
Program Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 19730420 200312 2 002

Diketahui oleh Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 19780502 200112 2 002

**Tesis ini telah di pertahankan di depan
Sidang **Panitia** Penguji Pada**

Tanggal 25 Juni 2026

Susunan Panitia Penilai

Ketua : Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Sekretaris : Lena Hanifah, S.H., LL.M.

Anggota : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Septi Puspita Anggraini, S.H
NIM : 2420216320089
Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung
Mangkurat Banjarmasin
Tesis : Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berbasis
Digital

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini saya buat Adalah benar-benar karya saya sendiri dan bebas dari unsur plagiarisme.
2. Pada penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu program Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari diketahui tesis ini terbukti meniru atau menjiplak hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai akibat dari pembuatan tersebut.

Banjarmasin, 10 Juli 2026
Yang membuat Pernyataan,



Septi Puspita Anggraini, S.H



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM**

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

diberikan kepada :

**SEPTI PUSPITA ANGGARINI
NIM 2420216320089**

**MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

Judul Tesis :

**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA
BERBASIS DIGITAL**

Telah dideteksi tingkat plagiasinya sebesar : 17%
sesuai dengan kriteria teloransi $\leq 20\%$ dan dinyatakan bebas plagiasi

Banjarmasin, 30 Juli 2026



Mengetahui,
Dekan
Dekan Bidang Akademik

Dr. HA Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1 002

Koordinator Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum ULM

Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

RINGKASAN

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BERBASIS DIGITAL

Oleh:

Septi Puspita Anggraini¹, Nurunnisa²

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 123

Halaman

Notaris merupakan pejabat yang memegang jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada publik. Eksistensi profesi Notaris yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) makin diperluas lagi melalui pendapat Majelis Hakim Konstitusi yang menyatakan bahwa Notaris merupakan profesi dan pejabat umum yang melaksanakan sebagian dari tugas pemerintah. Hal tersebut bermakna Notaris memberikan manfaat untuk membantu tugas-tugas pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk apabila ada masalah muncul ketika kebutuhan masyarakat akan kecepatan dan fleksibilitas (seperti pembuatan akta via *teleconference*) berbenturan dengan formalitas akta otentik yang kaku. Jika Notaris memfasilitasi pembuatan akta berbasis digital tanpa landasan hukum yang sinkron, terdapat risiko besar, akta tersebut dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Hal ini tidak hanya merugikan para pihak dalam hal kepastian hukum dan pembuktian, tetapi juga menempatkan Notaris pada posisi yang rentan secara hukum. Notaris berpotensi digugat secara perdata atas perbuatan melawan hukum atau bahkan terseret dalam ranah pidana jika sistem digital yang digunakan tidak mampu menjamin otentisitas identitas para pihak. Oleh karena itu, penelitian ini krusial untuk membedah sejauh mana batasan pertanggungjawaban Notaris dan bagaimana status pembuktian akta digital tersebut dalam sistem peradilan di Indonesia.

Hasil penelitian ini bahwa Notaris dalam pembuatan akta berbasis digital menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Notaris tidak dapat mempertanggungjawabkan pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik, karena undang-undang yang secara eksplisit mengatur pembuatan akta otentik secara elektronik belum diatur. Bentuk tanggung jawab Notaris adalah secara perdata, akta tersebut dapat dianggap tidak sah dan dapat didegradasi menjadi akta bawah tangan sehingga terjadi kerugian para pihak dan Notaris bertanggung jawab mengganti kerugian tersebut. Kekuatan pembuktian akta Notaris berbasis digital dalam metode pembuktian di Indonesia dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kekuatan pembuktian dari akta digital masih belum memiliki ketetapan dan rawan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, hal ini disebabkan terjadinya pertentangan antar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia perihal akta otentik. Dalam UU Jabatan Notaris mensyaratkan kehadiran fisik dari para pihak di hadapan Notaris sedangkan dalam UU ITE diatur dan diakui bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah. Akibatnya, akta Notaris belum memenuhi tiga kekuatan pembuktian (lahiriah, formal, materiil) yang digagas Prof. Sudikno. Dengan demikian akta Notaris elektronik secara yuridis cenderung diposisikan sebagai dokumen elektronik biasa atau setara dengan akta di bawah tangan.

¹ NIM : 24202016320089

² Pembimbing

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BERBASIS DIGITAL

Oleh:

Septi Puspita Anggraini³, Nurunnisa⁴
Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 166
halaman

ABSTRAK

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Notaris, Pembuatan Akta, Berbasis Digital

Judul penelitian ini adalah Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berbasis Digital. Tujuan dan kegunaan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan akta berbasis digital menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan menganalisis kekuatan pembuktian akta Notaris berbasis digital dalam metode pembuktian di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif yang bersifat perspektif guna mendapatkan jawaban rumusan masalah. Rumusan masalah pertama membahas Pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan akta berbasis digital menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Notaris tidak dapat mempertanggungjawabkan pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik, karena undang-undang yang secara eksplisit mengatur pembuatan akta otentik secara elektronik belum diatur, Bentuk tanggung jawab Notaris adalah secara perdata, akta tersebut dapat dianggap tidak sah dan dapat didegradasi menjadi akta bawah tangan sehingga terjadi kerugian para pihak dan Notaris bertanggung jawab mengganti kerugian tersebut. Rumusan masalah kedua membahas pembuktian akta Notaris berbasis digital dalam metode pembuktian di Indonesia dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kekuatan pembuktian dari akta digital masih belum memiliki ketetapan dan rawan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, hal ini disebabkan terjadinya pertentangan antar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia perihal akta otentik. Dalam UU Jabatan Notaris mensyaratkan kehadiran fisik dari para pihak di hadapan Notaris sedangkan dalam UU ITE diatur dan diakui bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah. Akibatnya, akta Notaris belum memenuhi tiga kekuatan pembuktian (lahiriah, formal, materiil) yang digagas Prof. Sudikno. Dengan demikian akta Notaris elektronik secara yuridis cenderung diposisikan sebagai dokumen elektronik biasa atau setara dengan akta di bawah tangan.

³ NIM : 24202016320089

⁴ Pembimbing

NOTARY'S LIABILITY IN THE MAKING OF DIGITAL-BASED DEEDS

By:

Septi Puspita Anggraini¹, Nurunnisa²

Master of Notary Program, Lambung Mangkurat University, 166 pages

ABSTRACT

Keywords: Liability, Notary, Deed Making, Digital-based

The objectives of this study are to explore and analyze Notary's responsibility in the making of digital-based deeds according to Notary Profession Act and to analyze the evidentiary force of Notarial digital-based deeds in evidentiary method Indonesia. Method used is normative legal research with perspective characteristic in order to answer the rationales. The first rationale is to discuss Notary's responsibility in the making of digital-based deeds according to Notary Profession Act. It can be inferred that basically the Notary cannot be held responsible in the making of authentic deeds through electronic system because there is no Act which explicitly regulates the making of authentic deeds through electronic system. The form of Notary's responsibility based on civil law is that the said deeds are considered unlawful and can be degraded into unauthentic deeds, and the parties are harmed, thus the Notary is liable to compensate the loss. From criminal law point of view, the Notary can face criminal sanction if his action contains criminal element(s). Besides, the Notary can also be held administrative liability such as warning up to dismissal from the position as Notary. Therefore, dibutuhkan revision of Notary Profession Act is required to legalize expressly the concept of *Cyber Notary* which regulates the mechanism of "virtual attendance" and standardization of cyber document encryption in order to maintain its perfection in digital era. The second rationale deals with analyze the evidentiary force of Notarial digital-based deeds in evidentiary method Indonesia. It can be inferred that in principle the evidentiary force of Notarial digital deeds still does not have certainty and vulnerable to be degraded into unauthentic deeds. This due to occurrence of anatinomy among legislation on authentic deeds prevailing in Indonesia. The Notary Profession Act requires physical presence of the parties before the Notary while Electronic Information and Transactions Act regulates and recognizes that electronic documents as legal evidentiary instruments. Consequently, the notarial deeds have not yet fulfilled three evidentiary forces (physical, formal, material) which is recommended by Prof. Sudikno. Thus, legally speaking, electronic notarial deeds tend to be positioned as ordinary electronic document or equivalent to unauthentic deeds.

Certified by,



Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div
Authorized Sworn Translator

¹ Student Number : 24202016320089

² Supervisor

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan Rahmat, taufik, dan hidayahNya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini, walaupun penulis sadar bahwa dalam tesis ini masih jauh dari kata sempurna, selanjutnya shalawat dan salam kepada Nabi dan Rosul Muhammad SAW sebagai contoh tauladan dalam kehidupan manusia. Karya ilmiah tesis yang sederhana ini telah selesai dan dipersembahkan bagi orang-orang yang saya cintai dan sayangi:

1. Ayahanda dan ibunda, Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, saya persembahkan kepada ayah dan bunda saya Sanggu dan Jemi'ah, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik saya sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang salehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat saya balas, doa serta harappanmu semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada orantua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi Ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga Ayahanda dan Ibunda selalu mendapatkan lindunganNya, Dihaturkan sembah sujud untuk Ayah dan Ibu berdua;
2. Kakak-Kakak, atas bantuan, dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Doa kalian sangat dibutuhkan, semoga segala hal baik selalu menyertai;
3. Dosen pembimbing dan Penguji Tesis, Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H., Ibu Lena Hanifah, S.H., LL.M, PhD., dan Bapak Dr. Suprpto, S.H., M.H.,atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur panjatkan kepada Allah SWT atas kasih, anugerah dan berkah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini, yang berjudul **Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berbasis Digital**, sebagai tugas akhir dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Selanjutnya dengan seluruh kerendahan hati terhatur segala penghargaan dan salam terimakasih yang sangat tulis kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan selama ini:

1. Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
2. Bapak Dr. Suprpto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan sebagai Ketua penguji yang telah memberikan masukan, saran dan koreksi atas penulisan tesis ini;
3. Ibu Lena Hanifah, S.H., LL.M., sebagai Sekretaris penguji yang telah memberikan masukan, saran dan koreksi atas penulisan tesis ini;
4. Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing dan memberikan dorongan selama proses penyelesaian tesis ini;
5. Seluruh Dosen Pengasuh mata kuliah Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
6. Segenap Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Keuangan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
7. Orang Tua terkasih, segenap keluarga tercinta, rekan-rekan dan para sahabat yang senantiasa memberikan bantuan dan dorongan semangat yang tiada henti hingga dapat menyelesaikan studi ini.

Banjarmasin, 10 Juli 2026



Septi Puspita Anggraini, S.H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SERTIFIKAT UJI PLAGIASI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iv
RINGKASAN.....	v
RINGKASAN DALAM BAHASA INGGRIS	vi
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	21
C. Keaslian Penelitian	21
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	31
E. Tinjauan Pustaka	33
F. Metode Penelitian	44
BAB II PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BERBASIS DIGITAL MENURUT UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS	47
A. Eksistensi Notaris sebagai Pejabat Umum.....	47

B.	Karakteristik Dokumen Elektronik menurut UU ITE.....	64
C.	Perbandingan antara Akta Otentik Konvensional dan Digital	74
D.	Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Berbasis Digital Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris	93
E.	Bentuk Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Otentik Yang Dibuat Melalui Sistem Elektronik	100
BAB III	KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS BERBASIS DIGITAL DALAM METODE PEMBUKTIAN DI INDONESIA .	117
A.	Konsep <i>Cyber Notary</i> di Indonesia.....	117
B.	Pengaturan <i>Cyber Notary</i> dalam Undang-Undang Jabatan Notaris	120
C.	Kewenangan Notaris dalam Penggunaan <i>Cyber Notaris</i>	131
D.	Penerapan Prinsip Etika Jabatan Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Secara Elektronik	135
E.	Kekuatan Pembuktian Akta Notaris yang dibuat Secara Digital di Indonesia	140
BAB IV	PENUTUP.....	154
A.	Kesimpulan.....	154
B.	Saran	156
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Keaslian Penelitian	21
-----------	---------------------------	----